



## PENGARUH PEMAHAMAN MANAJER PUBLIK ATAS AKUNTABILITAS KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN BADAN PUBLIK DI PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Oleh:

**Dini Arwati**

Universitas Widyatama

**Abstrak** - Orde Baru mewariskan rendahnya instrumen pertanggungjawaban Instansi publik dan nyaris tidak meninggalkan mekanisme kelembagaan yang akuntabel yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan pengungkapan informasi keuangan dalam bentuk pertanggungjawaban. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 pada prinsipnya mendefinisikan pertanggungjawaban yang berangkat dari definisi manajerial dan keharusan untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan-tindakan yang pada umumnya untuk semua keberhasilan kegiatannya. Berdasarkan penelitian ini, telah dilakukan analisis pengaruh pemahaman badan publik atas akuntabilitas keuangan terhadap kinerja keuangan manajer publik, khususnya pada Pemerintah kota Bandung. Pengaruh pemahaman manajer publik atas akuntabilitas keuangan terhadap kinerja keuangan badan publik secara simultan memberikan pengaruh sebesar 30% . Sisa variasi sebesar 70% merupakan pengaruh faktor lainnya. Pengaruh pemahaman atas ketaatan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan secara parsial terhadap kinerja keuangan badan publik sebesar 44%. Pengaruh pemahaman atas pengungkapan informasi keuangan secara parsial terhadap kinerja keuangan badan publik sebesar 15%.

**Kata Kunci:** manajer publik, akuntabilitas, kinerja keuangan badan publik

**Abstract** - *New Order government inherit low-grade instrument public agency responsibility, and nearly has not leave accountability institutional mechanism according to the law of and act of expressing financial information as responsibility reporting. Statutory No. 28/1999, thus principally give responsibility definition is leaving from managerial definition must be responsible actions as general rule for all success activity. Building on the research, has done analysis influence public agency comprehension on financial accountability concerning performance of public managerial financial, in particular from the Bandung city. The influence public managerial comprehension on financial accountability concerning performance of public agency financial simultaneous give influence as big as 30%. Residue as big as 70% constitute influence another factor. The influence of loyalty to law of financial management partially concerning performance of public agency financial as big as 44%. The influence act of expressing financial information partially concerning performance of public agency financial as big as 15%.*

**Key Words:** *Public managerial, financial accountability, performance of public agency financial*

### 1. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejak tahun 1997 bergulirnya reformasi dengan ditandai jatuhnya orde baru setelah memerintah Republik selama lebih tiga puluh dua tahun. Bersamaan dengan reformasi tersebut bangsa Indonesia dilanda krisis multi dimensial di bidang ekonomi, moneter, hukum bahkan politik. Selanjutnya Pemerintah Indonesia bertekad untuk melaksanakan otonomi daerah yang berlaku efektif bulan Januari 2001, penyeleggara otonomi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Peraturan

Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom.

Di era otonomi daerah ini, Pemerintah daerah perlu memperkenalkan serangkaian langkah-langkah adanya pegalihan kewenangan. Entitas keuangan Pemerintah daerah yang penanggung jawabnya adalah Gubernur atau Bupati atau Wali kota. Peraturan tersebut menghendaki terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan, dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal yang lebih dinamis dan tuntutan masyarakat yang berkembang yaitu pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selama ini, proses pengelolaan anggaran Negara dilaksanakan oleh beberapa Instansi atau lembaga, maka keterlibatan beberapa Institusi berbeda dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya memerlukan koordinasi yang lebih baik. Salah satu persoalan yang mengganggu hubungan kerja dalam suatu Institusi atau Lembaga adalah perbedaan pemahaman. Bagaimanapun apa yang dipahami seseorang dapat berbeda dari kenyataan yang ada. Manajer harus mengembangkan pemahaman yang akurat mengenai suatu yang dikerjakannya. Perbedaan pemahaman antara orang atau individu atau kelompok akan menunjukkan perbedaan pemahaman suatu Instansi organisasi mencapai kesuksesan atau kegagalan. Perbedaan pemahaman juga disebabkan oleh masalah komunikasi antara satu dengan yang lainnya, baik secara perorangan maupun secara kelompok dalam proses tersebut siapapun yang mengambil inisiatif apakah seorang bawahan ataukah seorang manajer, pengambil inisiatif selalu berharap agar tujuannya berkomunikasi dapat diterima dan dimengerti oleh yang menerima. Pemahaman yang salah akan menyebabkan penempatan orang yang salah, manajer publik membutuhkan pemahaman karena pemahaman yang dikembangkan seseorang dari gagasan dan sikapnya akan mempengaruhi perilaku seseorang, jika pegawai berpotensi untuk memahami tentang kedudukan atau penempatan yang sesuai dengan keahliannya, pegawai tersebut akan termotivasi dan merasa puas.

Orde baru mewariskan rendahnya instrumen pertanggungjawaban Instansi publik dan nyaris tidak meninggalkan mekanisme kelembagaan yang akuntabel yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan pengungkapan informasi keuangan dalam bentuk pertanggungjawaban. Masyarakat lebih banyak berperan hanya sebagai obyek pembangunan dan bukan bekerja dalam pola *partnership* dan peningkatan kinerja. Untuk keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut dengan baik diperlukan adanya faktor pendukung yaitu rasa tanggung jawab dan sikap taat azas dalam pengelolaan atau disiplin anggaran dari seluruh aparat Institusi yang terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran.

Undang-undang nomor 28 tahun 1999 pada prinsipnya mendefinisikan pertanggungjawaban yang berangkat dari definisi manajerial dan keharusan untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan-tindakan yang pada umumnya untuk semua kegiatan berhasil kegiatannya. Pertanggungjawaban tersebut harus puas menitik beratkan pada perlunya transparansi dan keharusan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai pemerintah. Dengan demikian bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud adalah suatu model pertanggungjawaban yang dipercaya rakyat.

Kepercayaan kepada pemerintah pada saat ini sangat rendah, kurangnya kepercayaan rakyat disebabkan oleh selalu seringnya dikecewakan oleh tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Akhir-akhir ini banyak informasi diperoleh yang berkaitan dengan terjadinya *mal administration*, banyak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berjalan.

Tugas seorang manajer yang paling penting dan utama adalah bagaimana menciptakan suatu sistem akuntabilitas keuangan yang diterima masyarakat sehingga evaluasi kinerja keuangan jelas. Kinerja keuangan instansi pemerintah selama ini lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam pelayanan belum memuaskan.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, perlu dilakukan analisis pengaruh pemahaman badan publik atas akuntabilitas keuangan terhadap kinerja keuangan manajer publik, khususnya pada Pemerintah kota Bandung. Sepanjang pengetahuan penulis judul penelitian di atas belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi sekaligus kajian temu-temuan di lapangan yang dapat dijadikan dasar bagi pihak pemerintah untuk meningkatkan kinerja keuangan badan publik melalui pemahaman manajer publik atas akuntabilitas keuangan.

## 1.2 Identifikasi Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh pemahaman manajer publik atas akuntabilitas keuangan secara simultan terhadap kinerja keuangan badan publik.
2. Apakah terdapat pengaruh pemahaman atas ketaatan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan secara parsial terhadap keuangan badan publik.
3. Apakah terdapat pengaruh pemahaman atas pengungkapan informasi keuangan secara parsial terhadap kinerja keuangan badan publik.

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh pemahaman manajer publik atas akuntabilitas keuangan secara simultan terhadap kinerja keuangan badan publik.
2. Untuk menguji pengaruh pemahaman atas ketaatan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan secara parsial terhadap kinerja keuangan badan publik.
3. Untuk menguji pengaruh pemahaman atas pengungkapan informasi keuangan secara parsial terhadap kinerja keuangan badan publik.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan bagi pemerintah kota, dalam hal ini para manajer publik akan tingkat pemahaman atas akuntabilitas keuangan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan.
2. Kegunaan bagi pengembangan ilmu, khususnya akuntansi pemerintahan dan ekonomi manajemen sehingga dapat dijadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut.

#### 1.5 Kerangka Pemikiran

Adanya tuntutan masyarakat agar Pemerintah bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan tuntutan akuntabilitas sektor publik, diperlukan persamaan pemahaman Instansi organisasi. Persamaan pemahaman manajer publik atas akuntabilitas keuangan dapat mendukung terwujudnya peningkatan kinerja keuangan manajer publik.

#### 1.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis pada penelitian ini adalah pemahaman manajer publik atas akuntabilitas keuangan secara simultan diduga berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan badan publik. Sedang sub-hipotesis pada penelitian ini adalah:

1. Secara parsial terdapat pengaruh signifikan pemahaman atas ketaatan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan badan publik.
2. Secara parsial terdapat pengaruh signifikan pemahaman atas pengungkapan informasi keuangan terhadap kinerja keuangan badan publik.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Pemahaman

Pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam mengartikan suatu hal, dan merupakan suatu proses, perbuatan, cara memahami dan memahamkan, yang dimaksud dengan kata memahami adalah sebagaimana yang diartikan Peter Salim dan Yeni Salim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer (1991). Pengertian-pengertian juga dijelaskan oleh Nana Sujana (1995:22), *Dictionary Information* (2002:1).

### 2.2 Manajer Publik

Manajer diartikan sebagai seseorang yang bertanggungjawab atas segala kegiatan yang terjadi dalam organisasi atau pada unit organisasi yang dipimpinya. (Azhar 2000:72). Dari sisi kebijakan publik, sektor publik dipahami sebagai tuntutan pajak, birokrasi yang berlebihan, pemerintahan yang besar dan nasionalisasi versus prestasi. (Bastian, 2001:1) Manajer Publik adalah orang yang bertanggung jawab atas segala kegiatan atau

aktivitas yang terjadi dalam organisasi sektor publik yang bertujuan memuaskan para pihak yang berkepentingan melalui pelayanan dan kepercayaan publik.

### 2.3 Organisasi Pemerintah

#### Pemerintah Secara Umum

Pemerintah secara umum, dibentuk dan didirikan untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya, melindungi rakyatnya, dan mencukupi kepentingan-kepentingan rakyatnya. Untuk mencapai tujuan tersebut Negara membentuk suatu organisasi yang diserahi tugas untuk melaksanakan tujuan tersebut dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan Negara. Organisasi yang dibentuk dan diberi kuasa oleh Negara disebut pemerintah.

#### Pembagian Kekuasaan Pemerintah

Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, menempatkan Presiden sebagai penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Presiden memiliki kekuasaan penyelenggara pemerintahan negara, meliputi apa yang dalam trias politika disebut kekuasaan eksekutif dan legislatif, dengan pengertian bahwa kekuasaan eksekutif itu dijalankan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

#### Pemerintah Daerah

Pada dasarnya otonomi atau desentralisasi pusat ke daerah seperti yang diwujudkan dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Yang kemudian diganti dengan undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

### 2.4 Pengertian Akuntabilitas

Penyelenggaraan sektor publik dan pengelolaan kekayaan negara, dapat dikatakan memenuhi syarat akuntabilitas bila penyelenggaraan dan atau pengelolaan publik serta penggunaan kekayaan negara telah sesuai dengan prosedur, tujuan dan manfaat yang telah ditetapkan. Akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam tujuan-tujuan dan sasaran yang telah disiapkan secara periodik.

### 2.5 Kinerja Keuangan

Pengertian Kinerja menurut Bastian (2001:329) adalah: "gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi

organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu." Kinerja keuangan instansi pemerintah meliputi anggaran rutin dan anggaran pembagian, aspek keuangan dapat dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia.

### 3. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

#### 3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pemahaman manajer publik atas akuntabilitas keuangan terhadap kinerja keuangan badan publik di Pemerintah Kota Bandung.

#### 3.2 Metode Penelitian

##### 3.2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini adalah asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui

hubungan dua variabel atau lebih. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan-hubungan antara variabel sosiologis maupun fisiologis (Sugiono, 1999:7).

##### 3.2.2 Operasionalisasi Variabel

- Pemahaman manajer Publik atas Akuntabilitas keuangan, yaitu terdiri dari Pemahaman atas ketaatan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan ( $x_1$ ) dan
- Pemahaman atas pengungkapan informasi keuangan ( $x_2$ )
- Kinerja keuangan badan publik ( $h$ )

##### 3.2.3 Metode Penentuan Sampel

Komposisi Manajer Publik di Pemerintah Kota Bandung

No.	Nama Manajer Publik	Populasi	Jumlah Sampel
1.	Manajer Lembaga Teknis Daerah	13	6
2.	Manajer Dinas Daerah	22	10
3.	Manajer Usaha Milik Daerah	3	1
4.	Manajer Kecamatan	26	12
5.	Manajer Kelurahan	126	56
	Jumlah	190	85

Sumber: Bagian Organisasi Pemerintah Kota Bandung

##### 3.2.4 Prosedur Pengumpulan Data

Beberapa manajer diberikan kuesioner. Test validitas menggunakan teknik korelasi. Uji reliabilitas menurut Saifuddin Azwar (1997:36). Dalam penelitian ini digunakan pendekatan teknik pembelahan test formula Sperman Brown. (Masri Singarimbun (1989: 143-144)

$$X1.3 = I_3x_1 + d_3$$

$$X2 = I_4x_2 + d_4$$

$$Y1 = I_5h + 3_1$$

$$Y2 = I_6h + 3_2$$

$$Y3 = I_7h + 3_3$$

##### 3.2.5 Metode Analisis

Data yang terkumpul dari hasil kuesioner di analisis dan menerapkan skor metode *Likert's Summated Ratings*.

Selanjutnya skor total untuk seluruh responden dinaikkan tingkat pengukurannya ke tingkat interval melalui *method of successive interval* (Harun al Rasyid, 1994:131).

Model analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah *Struktural Equation Modelling (SEM)* dan berdasarkan paradigma penelitian dapat disusun model struktural dalam bentuk persamaan struktural (Solimun, 2002:76).

$$h = g_1x_1 + g_2x_2 + z$$

$$X1.1 = I_1x_1 + d_1$$

$$X1.2 = I_2x_1 + d_2$$

Keterangan:

$h$ : Kinerja Keuangan Badan Publik (variabel laten endogen)

$x_1$ : Pemahaman terhadap Ketaatan Perundang-undangan dalam Pengelolaan Keuangan (variabel laten eksogen) [Ksi1]

$x_2$ : Pemahaman terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan (variabel laten eksogen) [Ksi2]

$z$ : Galat model [zeta]

$I_i$ : Koefisien pengukuran pada variable manifest untuk suatu variable laten [ $\lambda$ : *loading factor*]

$d_i$ : Galat pengukuran pada variabel manifest ke  $i$  untuk suatu variabel laten [ $\delta$ ]

$3_i$ : Galat pengukuran pada variabel manifest ke  $i$  untuk suatu variabel laten endogenous [ $\epsilon$ ]

$g_i$ : Koefisien pengaruh variable eksogen ke  $i$  terhadap endogen [ $\gamma$ ]

Tinggi rendahnya validitas konstruksi, keeratn hubungan, atau kuat lemahnya pengaruh akan

dikategorikan merujuk kepada standar kategori Guilford mengenai koefisien korelasi (*Multivariate Analysis*).

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 HASIL PENELITIAN

#### 4.1.1 Gambaran Umum Pemerintah Kota Bandung

Sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi dalam bentuk otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Untuk mendukung tugas dan fungsi jalannya pemerintahan daerah terdapat 204 Badan atau Dinas yang ada di Pemerintah Kota Bandung, berdasarkan penarikan sampel simpel random sampling yang dialokasikan secara proporsional ditetapkan 85 manajer publik BUMD, lembaga teknis, Dinas Daerah.

#### 4.1.2 Pengujian Data

##### Uji Validitas

Dalam pengujian validitas ini peneliti menggunakan program Lisrel dengan cara mengoreksi skor masing-masing pertanyaan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel. Untuk variabel independen (X) sebanyak 41 pertanyaan terdiri atas pemahaman standar dan peraturan daerah mengenai sistem informasi keuangan 5 pertanyaan, pemahaman sistem akuntansi dan pengawasan pengelolaan keuangan 19 pertanyaan, pemahaman atas pemeriksaan internal dalam pengelolaan keuangan 10 pertanyaan, pemahaman atas pengungkapan informasi keuangan 7 pertanyaan. Untuk variable dependen (Y) sebanyak 17 pertanyaan, terdiri atas kualitas pelaporan 6 pertanyaan, selisih realisasi anggaran pendapatan dan belanja 6 pertanyaan, dan kualitas laporan 5 pertanyaan. Untuk pertanyaan tersebut keseluruhannya berstatus valid semua  $r_{hitung} > r_{table}$ .

##### Uji Reliabilitas

Uraian dari hasil perhitungan dalam rekapitulasi perhitungan reliabilitas didasarkan atas hasil jawaban kuesioner yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai alat ukur yang diharapkan. Hasil perhitungan semuanya menunjukkan reliabel atau  $r_{tot} > r_n$ .

#### 4.1.3 Transformasi Data

Transformasi data dilakukan karena data hasil penelitian yang terkumpul dengan menggunakan kuesioner adalah data berskala ordinal. Data yang

berskala ordinal tidak bisa diolah secara langsung menggunakan uji statistik *Structural Equation Modelling* (SEM). Syarat data untuk dapat digunakan dalam analisis SEM adalah sekurang-kurangnya skala interval. Oleh karena itu, data penelitian yang digunakan skala ordinal terlebih dahulu dilakukan transformasi data untuk menaikkan pengukuran dari ordinal ke interval dengan metode *successive interval*.

#### 4.1.4 Pemahaman Manajer Publik Atas Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan hasil jawaban dari para manajer publik melalui kuesioner yang diajukan, dapat diketahui pemahaman manajer publik akuntabilitas keuangan. Hasil jawaban kuesioner dari para manajer dijalankan, kemudian dibandingkan dengan skor ideal (jumlah skala likert x jumlah pertanyaan) yang dalam kuesioner ini jawaban yang ideal adalah 5x5 yaitu 25.

Dari tabel-tabel tingkat pemahaman yang tersedia dapat diperoleh:

- Para manajer publik untuk tingkat pemahaman standard dan peraturan daerah mengenai sistem informasi keuangan dengan persentase 47,0% atau sebanyak empat puluh dengan tingkat pemahaman tinggi, sedangkan sebanyak 51,8% atau 44 manajer publik mempunyai tingkat pemahaman cukup, sedang yang mempunyai tingkat pemahaman kurang memahami hanya 1,2% atau 1 manajer.
- Para manajer publik untuk tingkat pemahaman sistem akuntansi dan pengawasan pengelolaan keuangan dengan persentase 58,8% atau sebanyak 50 orang dengan tingkat pemahaman tinggi, sedangkan sebanyak 41,2% atau 35 manajer publik cukup.
- Para manajer publik untuk tingkat pemahaman pemeriksaan internal dalam pengelolaan keuangan dengan persentase tingkat pemahaman 52,9% atau sebanyak 45 manajer publik tinggi, sedangkan sebanyak 47,1% atau 40 manajer publik cukup.
- Para manajer publik atas pengungkapan informasi keuangan dengan tingkat pemahaman 43,5% atau sebanyak 37 manajer publik mempunyai pemahaman tinggi sedangkan sebanyak 55,3% atau 47 manajer publik cukup, dan 1,2% atau 1 manajer publik kurang.

#### 4.1.5 Kinerja Keuangan Badan Publik

Untuk mengetahui kinerja keuangan badan publik dalam penelitian ini dapat dicapai dari hasil jawaban kuesioner dijumlahkan, kemudian dibandingkan dengan skor ideal (jumlah skala

Likert x jumlah pertanyaan) yang dalam kuesioner ini jawaban yang ideal adalah 5x17 yaitu 85.

- Kinerja keuangan badan publik, kualitas pelaporan keuangan dengan persentase tingkat kinerja 47,1% atau sebanyak 40 badan publik dengan tingkat kinerja tinggi, persentase tingkat kinerja cukup sebesar 38,8% atau sebanyak 33, sedangkan persentase tingkat kinerja kurang 14,1% atau sebanyak 12 badan publik.
- Kinerja keuangan badan publik, selisih realisasi anggaran pendapatan dan belanja, persentase tingkat kinerja tinggi sebesar 35% atau sebanyak 30 badan publik, persentase tingkat kinerja cukup sebesar 57,6% atau sebanyak 49 badan publik, sedangkan persentase tingkat kerja kurang sebesar 7,1% atau sebanyak 6 badan publik.
- Kinerja keuangan badan publik, kualitas laporan, persentase tingkat kinerja tinggi sebesar 61,2% atau sebanyak 52 badan publik, persentase tingkat kinerja cukup sebesar 32,9% atau sebanyak 28 badan publik, sedangkan persentase tingkat kinerja kurang 5,9% atau sebanyak 5 badan publik.

#### 4.2 Pengujian *Structural Equation Modelling (SEM)*

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemahaman atas ketaatan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan (x1) dan pemahaman atas pengungkapan informasi keuangan (x2) terhadap kinerja keuangan badan publik (h) di Pemerintah Kota Bandung, baik secara simultan maupun secara parsial. Metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah *Structural Equation Modelling (SEM)*.

##### 4.2.1 Uji Validitas Konstruksi Variabel Laten Pemahaman atas Ketaatan Perundang-undangan dalam Pengelolaan Keuangan

Diagram dalam bentuk terstandarkan (dengan data yang dinormal-bakukan) dan persamaan struktural dari analisis faktor konfirmatori untuk variabel laten Pemahaman atas Ketaatan Perundang-undangan dalam Pengelolaan Keuangan (x1) adalah sebagai berikut:

- Validasi konstruksi indikator tingkat pemahaman standard dan peraturan daerah mengenai sistem informasi keuangan (X<sub>1.1</sub>):  $l_{1S} = 0,50$  (kevalidan konstruksi sedang, Guilford). Nilai *loading* (l) terstandarkan positif. Determinasi kevalidan konstruksi indikator ini sebesar  $R^2 = 25\%$ . Kevalidan konstruksi ini signifikan pada taraf kesalahan 5% dengan  $t_{hitung} > (t_{0,025(83)} = 1,9890)$  di mana:

$$t_{\lambda 1} = \frac{\lambda_1}{SE_{\lambda 1}} = \frac{1,68}{0,38} = 4,45$$

- Validasi konstruksi indikator tingkat pemahaman sistem akuntansi dan pengawasan pengelolaan keuangan (X<sub>1.2</sub>):  $l_{2S} = 0,84$  (kevalidan konstruksi sedang, Guilford). Nilai *loading* (l) terstandarkan positif. Determinasi kevalidan konstruksi indikator ini sebesar  $R^2 = 71\%$ . Kevalidan konstruksi ini signifikan pada taraf kesalahan 5% dengan  $t_{hitung} > (t_{0,025(83)} = 1,9890)$  di mana:

$$t_{\lambda 2} = \frac{\lambda_2}{SE_{\lambda 2}} = \frac{6,58}{0,82} = 8,04$$

- Validasi konstruksi indikator tingkat pemahaman pemeriksaan internal dalam pengelolaan keuangan (X<sub>1.3</sub>):  $l_{3S} = 0,66$  (kevalidan konstruksi sedang, Guilford). Nilai *loading* (l) terstandarkan positif. Determinasi kevalidan konstruksi indikator ini sebesar  $R^2 = 44\%$ . Kevalidan konstruksi ini signifikan pada taraf kesalahan 5% dengan  $t_{hitung} > (t_{0,025(83)} = 1,9890)$  di mana:

$$t_{\lambda 3} = \frac{\lambda_3}{SE_{\lambda 3}} = \frac{3,19}{0,52} = 6,14$$

##### 4.2.2 Uji Validitas Konstruksi Variabel Laten Kinerja Keuangan Badan Publik

Diagram dalam bentuk terstandarkan (dengan data yang dinormal-bakukan) dan persamaan struktural dari analisis faktor konfirmatori untuk variabel laten Kinerja keuangan badan publik (h) adalah sebagai berikut:

- Validasi konstruksi indikator Kualitas pelaporan keuangan (Y<sub>1</sub>):  $l_{5S} = 0,47$  (kevalidan konstruksi sedang, Guilford). Nilai *loading* (l) terstandarkan positif. Determinasi kevalidan konstruksi indikator ini sebesar  $R^2 = 22\%$ . Kevalidan konstruksi ini signifikan pada taraf kesalahan 5% dengan  $t_{hitung} > (t_{0,025(83)} = 1,9890)$  di mana:

$$t_{\lambda 5} = \frac{\lambda_5}{SE_{\lambda 5}} = \frac{1,20}{0,32} = 3,74$$

- Validasi konstruksi indikator Selisih realisasi anggaran pendapatan dan belanja (Y<sub>2</sub>):  $l_{6S} = 0,70$  (kevalidan konstruksi sedang, Guilford). Nilai *loading* (l) terstandarkan positif. Determinasi kevalidan konstruksi indikator ini sebesar  $R^2 = 49\%$ . Kevalidan konstruksi ini signifikan pada taraf kesalahan 5% dengan  $t_{hitung} > (t_{0,025(83)} = 1,9890)$  di mana:

$$t_{\lambda 6} = \frac{\lambda_6}{SE_{\lambda 6}} = \frac{1,84}{0,35} = 5,31$$

- Validasi konstruksi indikator Kualitas Laporan (Y<sub>3</sub>):  $t_{75} = 0,66$  (kevalidan kontruksi sedang, Guilford). Nilai *loading* (l) terstandarkan positif. Determinasi kevalidan kontruksi indikator ini sebesar  $R^2 = 53\%$ . Kevalidan kontruksi ini signifikan pada taraf kesalahan 5% dengan  $t_{hitung} > (t_{0,025(83)} = 1,9890)$  di mana:

$$t_{\lambda 7} = \frac{\lambda_7}{SE_{\lambda 7}} = \frac{2,12}{0,39} = 5,42$$

Dari deskripsi validitas kontruksi ketiga indikator di atas, indikator Kualitas Laporan (Y<sub>3</sub>) mempunyai validitas kontruksi yang paling tinggi.

#### 4.2.3 Uji Pengaruh Pemahaman atas Ketaatan Perundang-undangan dalam Pengelolaan Keuangan dan Pemahaman atas Pengungkapan Informasi Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Badan Publik

Deskripsi distribusi konstribusi pengaruh Pemahaman atas ketaatan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan ( $x_1$  [Ksi<sub>1</sub>]) dan Pemahaman atas pengungkapan informasi keuangan ( $x_2$  [Ksi<sub>2</sub>]) terhadap Kinerja keuangan badan publik (h [Eta]), baik pengaruh langsung maupun tidak langsung.

Deskripsi distribusi konstribusi pengaruh Pemahaman

	Pengaruh Langsung		Pengaruh tidak langsung, melalui				Pengaruh Total		
	Ksi <sub>1</sub>	Ksi <sub>2</sub>	Ksi <sub>1</sub>	Ksi <sub>2</sub>	Sub Total				
Ksi <sub>1</sub>	19.36%	+	-	4.36%	+	4.36%	+	23.72%	+
Ksi <sub>2</sub>	2.25%	+	4.36%	+	-	4.36%	+	6.61%	+
Pengaruh variable Ksi1 dan Ksi2 terhadap Eta							30.32%	+	
Pengaruh variable lain terhadap Eta							69.68%		
Total							100.00%		

#### Uji model secara overall (keseluruhan)

Goodness of fit	Cut-off	Hasil Analisis
Chi <sup>2</sup>	Non signifikan	15,31 (p-vau = 0,22 <sup>ns</sup> )
RMSEA	≤ 0,08	0,057 (p-value = 0,40 <sup>ns</sup> )
RMR	Kecil	0,053 (standardized)
GFI	≥ 0,90	0,95
AGFI	≥ 0,90	0,88
CFI	≥ 0,94	0,96

Keterangan:

RSMEA : Root Mean Square Error of Aproximation

RMR : Root Mean Square Residual

GFI : Goodness of Fit Index

AGFI : Adjusted Goodness of Fit Index

CFI : Comparative Fit Index

Hasil uji model secara overall di atas, setelah dibandingkan dengan nilai *cut-off* untuk masing-masing pengukur, menunjukkan bahwa model secara keseluruhan telah sesuai.

### 4.3 PEMBAHASAN

#### 4.3.1 Analisis Pengaruh Pemahaman Manajer Publik atas Akuntabilitas Keuangan Secara Simultan terhadap Kinerja Keuangan Badan Publik

Pengaruh pemahaman manajer publik atas akuntabilitas keuangan terhadap kinerja keuangan badan publik secara simultan ditunjukkan oleh besar kecilnya nilai koefisien determinasi multipel  $R^2$  atau  $1 - R^2_{error}$ . Kuat lemahnya pengaruh variabel besar kecilnya nilai koefisien korelasi nilai multipel R yang merupakan akar dari  $R^2 = 30\%$ . Besarnya variasi kinerja keuangan badan publik yang dijelaskan oleh pemahaman atas ketaatan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan ( $x_1$ ) dan pemahaman atas pengungkapan informasi keuangan ( $x_2$ ) adalah sebesar 30%. Sisa variasi sebesar 70% merupakan pengaruh faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini adalah variabel akuntabilitas internal yang merupakan pertanggungjawaban kepada Tuhannya.

Sedangkan kuatnya pengaruh antara variabel eksogen terhadap variabel endogen ditunjukkan dengan nilai R = 0,548. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor dari variabel eksogen yaitu pemahaman atas ketaatan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan ( $x_1$ ) dan pemahaman atas pengungkapan informasi keuangan ( $x_2$ ) secara simultan cukup kuat.

Tinggi rendahnya keeratan hubungan antara pemahaman atas ketaatan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan ( $x_1$ ) dengan pemahaman atas pengungkapan informasi keuangan ( $x_2$ ) ditunjukkan oleh nilai  $f_{21}$  terstandarkan  $f_{215} = 0,66$ . Nilai  $f_{21}$  terstandarkan positif yang berarti pemahaman atas ketaatan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan

( $x_1$ ) berhubungan positif dengan pemahaman atas pengungkapan informasi ( $x_2$ ), yaitu semakin tinggi pemahaman ketaatan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan, semakin tinggi pula pemahaman atas pengungkapan informasi keuangan.

#### 4.3.2 Analisis Pengaruh Pemahaman atas Ketaatan Perundang-undangan dalam Pengelolaan Keuangan Secara Parsial terhadap Kinerja Keuangan Badan Publik

Secara parsial, pengaruh pemahaman atas ketaatan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan ( $x_1$ ) terhadap kinerja keuangan badan publik ( $h$ ) ditunjukkan oleh nilai  $g$  terstandarkan  $g_{s1} = 44$  (pengaruh  $x_1$  secara parsial cukup kuat). Nilai  $g$  terstandarkan positif yang berarti pemahaman atas ketaatan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan ( $x_1$ ) secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan badan publik ( $h$ ), yaitu semakin tinggi pemahaman atas ketaatan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan semakin tinggi pula kinerja keuangan badan publik.

#### 4.3.3 Analisis Pengaruh Pemahaman atas Pengungkapan Informasi Keuangan Secara Parsial terhadap Kinerja Keuangan Badan Publik

Pengaruh secara parsial ini tidak signifikan di mana  $t = 0,85$ , hal ini disebabkan para manajer publik enggan untuk mengungkapkan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan pertanggungjawaban seringkali hanya digunakan untuk mencari kegagalan daripada keberhasilan. Dengan demikian informasi keuangan sebagai penyedia informasi untuk melihat hasil kerjanya lebih merupakan alat untuk menghukum setiap kegagalan yang dilakukan.

Manajer Publik memiliki kecenderungan untuk menutupi kekurangannya terhadap penyimpangan yang merugikan dengan cara memanipulasi data, akibatnya informasi keuangan yang dihasilkan cenderung memberikan informasi yang tidak lengkap.

Kepala daerah dapat melakukan pengarahan, pembinaan, dan supervisi serta melakukan koordinasi dengan pejabat pengawas keuangan internal. Pejabat pengawas internal tersebut tetap melaporkan hasil pengawasannya secara obyektif berdasarkan fakta dan data di lapangan dan bukan atas pertimbangan politis.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh pemahaman manajer publik atas akuntabilitas keuangan secara simultan terhadap kinerja keuangan badan publik dijelaskan oleh:
  - Pemahaman atas ketaatan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan.
  - Pemahaman atas pengungkapan informasi keuangan.

Secara simultan memberikan pengaruh sebesar 30% terhadap kinerja keuangan badan publik. Sisa variasi sebesar 70 % merupakan pengaruh faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini adalah variabel akuntabilitas internal yang merupakan pertanggungjawaban orang kepada Tuhannya.

2. Pengaruh pemahaman atas ketaatan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan secara parsial terhadap kinerja keuangan badan publik sebesar 44%. Pengaruh secara parsial ditunjukkan oleh setiap indikator dan variabel laten adalah tingkat pemahaman standar dan peraturan daerah mengenai sistem informasi keuangan, tingkat pemahaman sistem akuntansi dan pengawasan pengelolaan keuangan, tingkat pemahaman pemeriksaan internal dalam pengelolaan keuangan. Dari deskripsi ketiga indikator di atas, indikator tingkat pemahaman standar dan peraturan daerah mengenai sistem keuangan memberikan kontribusi paling kecil, hal ini disebabkan upaya sosialisasi dari berbagai produk hukum dan peraturan tidak dilakukan secara serempak dan terpadu.
3. Pengaruh pemahaman atas pengungkapan informasi keuangan secara parsial terhadap kinerja keuangan badan publik. Secara parsial memberikan pengaruh sebesar 15%, hal ini disebabkan para manajer publik enggan untuk mengungkapkan informasi keuangan dengan lengkap, karena seringkali hanya digunakan untuk mencari kegagalan daripada keberhasilan.

### 5.2 Saran

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Kantor Pemerintah Kota Bandung

Untuk meningkatkan tingkat pemahaman atas ketaatan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan, khususnya standard dan peraturan daerah mengenai sistem informasi keuangan. Bagian Hukum sebaiknya membuat ringkasan

peraturan keuangan sebagai upaya sosialisasi dari berbagai produk peraturan agar dapat dilaksanakan secara serentak dan terpadu.

Ada koordinasi dengan pejabat pengawas keuangan atas hasil pemeriksaannya, dan melakukan tuntutan ganti rugi atau sanksi administrasi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum.

## 2. Kepada Peneliti lainnya.

Agar penelitian selanjutnya menggunakan variabel independen atau tambahan dari variabel yang ada terhadap kinerja keuangan badan politik. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor apakah yang sangat dominan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan badan publik.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundangan

- Keputusan Kepala LAN nomor: 589/IX/6/Y/99 tahun 1999 tentang pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- TAP MPR RI nomor: XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
- Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia No. 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2001.
- Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

### Kepustakaan

- Arens, Alvin dan James K. Loebeck**, 2000, *Auditing and Integrated Approach*, 8<sup>th</sup> edition, New Jersey; Prentice Hall International.
- Azhar Susanto**, 2000, *Sistem Informasi Akuntansi: Konsep-Analisis-Desain*, Lembaga Informasi Akuntansi, UNPAD Bandung
- Azwar, Azrul**, 1996, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Edisi Ketiga, Binarupa Aksara.
- Djamaludin Ancok**, 1995, *Teknik Penyusunan Skala Pengukuran*, Universitas Gajah mada, Yogyakarta.

- Gary Sigel, Helena Ramanauskas, Marcom**, 1989, *Behavioral Accounting*, South Western Publishing Co Cincinnati.
- Gibson, Ivancevich, Donnelly**, 1994, *Organisasi Perilaku, Struktur, Proses* (Alih bahasa Djarkasih), Edisi kelima, Erlangga. Jakarta
- Harun Al Rasyid**, 1993, *Teknik Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala*, Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung
- Heidjrachman Ranupandoyo, dan Suad Husnan**, 1996, *Manajemen Personalial*, Edisi Keempat, BPFE Yogyakarta
- IAI**, 2009, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat.
- Indra Bastian**, 2001, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, BPFE Yogyakarta
- Lembaga Administrasi Negara**, 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance*
- Lili M. Sadeli, Bedjo Siswanto**, 1999, *Akuntansi Manajemen Sistem Proses dan Pemecahan Soal*, Cetakan Kesembilan, Haji Mas Agung, Jakarta.
- Masri Singariabun, Sofyan Effendi**, 1989, *Metode Penelitian Survey*, LP3S, Jakarta.
- Mulyadi**, 1992, *Akuntansi Manajemen Konsep, Manfaat dan Rekayasa*, Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonoi YKPN, Yogyakarta.
- Moh Natsir**, 1998, *Metode Penelitian*, Cetakan Ketiga, Ghalia, Jakarta.
- Nana Sudjana**, 1995, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Rosdakarya, Bandung.
- Peter Salim dan Yenny Salim**, 1999, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Edisi Pertama, Penerbit Modern English Press, Jakarta.
- Richard A. Johnson, Dean W. Winchern**, 1992, *Applied Multivariate Statistical Analysis*, Third Edition, Prentice Hall Englewood Cliffs, New Jersey.
- Robius Stevens**, 1996, *P. Organizational Behavior, Concept, Controversies and Applications*, Terjemahan Hadyana Pujaatmaka, Edisi Indonesia, Prehallindo, Jakarta.
- Saifudin Azwar**, 1997, *Reliabilitas dan Variditas*, Edisi Ketiga, Penerbit Pusataka Pelajar, Yogyakarta.
- Solimun**, 2002, *Multivariate Analysis, Structural Equation Modelling (SEM) Lisrel dan Amos. Aplikasi di Manajemen, Ekonomi Pembangunan, Psikologi, Sosial, Kedokteran dan Agrokompleks*.
- Sugiyono**, 1999, *Statistik untuk Penelitian*, Cetakan Kedua, CV.Alphabet, Bandung.
- , 1999, *Metode Penelitian Bisnis*, CV Alphabet, Bandung.
- Tim Pengembangan Konten Akuntansi Sektor Publik**, 2008, *Akuntansi Sektor Publik*,

Program Studi Akuntansi Universitas  
Widyatama, Bandung

#### Hasil Penelitian

**Iman Pirman Hidayat**, 2002, *Pengaruh Pemahaman Manajer Mengenai Akuntansi Perbankan dan Pengendalian Intern terhadap Efektifitas Pengendalian Intern.*

**Roebiandini Soemantri**, 1995, *Pengaruh Pemahaman Manajemen Mengenai Manfaat Informasi, Akuntansi manajemen dan Aplikasinya terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufacture*, Tesis Program Pascasarjana UNPAD Bandung.

#### Lain-lain

<http://www.sedtknowledge.com/102772.htm>

Dictionary Information (2002) Definition  
Understanding Thesaurus,  
Understanding, Description and Meaning;  
Understanding.

## 7. RIWAYAT HIDUP

**Nama : Dini Arwati.** Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 1 Desember 1958. **Pendidikan:** S1 Fakultas Ekonomi – Jurusan Akuntansi UNPAD Badung (1986), S2 Pasca Sarjana – Magister Ilmu Akuntansi UNPAD Bandung (2003). **Pekerjaan:** Lembaga Manajemen UNPAD (1982 – 1985). Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, PNS (1986 – 1991). Dosen Tetap Universitas Widyatama Bandung (1991 – sekarang). **Alamat:** Jalan Mars Selatan XIV No. 11A Bandung.Telp. (022) 7562781 HP. 08122379848.

